



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Inspektorat Dorong TGR Dewan Masuk Pidsus

**BINTUHAN** - Perpanjangan waktu pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur paling lambat ditunggu Agustus mendatang.

Jika tidak maka pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur kembali akan melimpahkan kasus ini ke Inspektorat Kaur.

Pembayaran TGR diperpanjang karena hingga batas akhir pembayaran yang sebelumnya telah ditentukan Kejari Kaur pada 10 April lalu.

Dari 25 anggota DPRD aktif serta 1 mantan anggota dewan Kaur baru 6 orang yang melakukan pelunasan.

Artinya, masih tersisa sebanyak 19 anggota DPRD serta 1 mantan dewan yang belum melakukan pelunasan.

Untuk itu pembayaran paling lambat dilakukan pada Agustus mendatang, karena pas di bulan tersebut masa jabatan anggota dewan juga akan berakhir.

Kendati masa jabatannya berakhir, anggota dewan yang belum melakukan pelunasan TGR harus tetap melakukan pembayaran. Karena itu adalah kewajiban dari mereka.

Kepala Kejari (Kajari) Kaur, Muhammad Yunus SH MH., melalui Kasi Intel, Andi Febrianda SH MH mengungkapkan, sampai dengan saat ini Kejari Kaur diberikan mandat oleh Inspektorat hanya untuk melakukan pemulihan kerugian negara.

Maka dari itu perkara ini akan di kembalikan ke Inspektorat di Agustus mendatang.

Jika masih ada yang belum melunasi maka, langkah selanjutnya yang akan ditempuh seperti apa tergantung koordinasi dari pihak Inspektorat.

"Paling lambat Agustus, kalau belum juga selesai kita akan lim-pahkan ke Inspektorat. Seperti apa nanti petunjuk selanjutnya kita tunggu keputusan dari mereka," ucap Andi.

Dia menjelaskan, saat ini Kejari Kaur baru berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp3,1 miliar.

Dari temuan sebelumnya lebih kurang sebesar Rp7 miliar, artinya masih ada sisa kurang lebih sebesar Rp3,8 miliar lagi yang harus dikem-balikan oleh anggota dewan yang bersangkutan.

"Sampai dengan Mei, baru 4 orang anggota dewan yang lunas sementara yang lain hanya menyicil belum pelunasan," terangnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika SE saat dikonfirmasi terkait dengan hal ini mengatakan, dirinya telah mendapatkan pemberitahuan dari Kejari Kaur bahwa anggota dewan masih ada yang belum melakukan pelunasan TGR sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

"Pemberitahuan sudah kita terima, untuk perkara ini masih kita serahkan ke pihak Kejari karena sudah MoU sebelumnya," ucap Harika.

Apabila nanti dalam tambahan waktu anggota dewan yang bersangkutan tak kunjung melakukan pelunasan maka Inspektorat Kaur kembali akan melakukan evaluasi.

Meminta data siapa saja yang masih belum melakukan pelunasan.

Dan tidak menutup kemungkinan, Inspektorat akan kembali melimpahkan penanganan temuan ini ke Kejari Kaur untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

"Kalau memang tidak ada niatan baik, maka kita akan rekomendasikan ke Kejari untuk naik ke Bidang Pidsus (tindak pidana khusus, red)," tegas Harika. (cil)